

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era reformasi saat ini, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Terlebih lagi dengan mengingat bahwa Indonesia masih tergolong negara berkembang yang terus bersaing dengan negara lain dalam meningkatkan pembangunannya. Selain itu, era globalisasi juga mengharuskan setiap negara untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Khususnya dalam aspek pembangunan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan nasional, harus berawal dari peningkatan pembangunan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai penunjang peningkatan pembangunan daerah tersebut.

Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Lebih lanjut lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi disuatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukan usaha pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal

melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dalam program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu yang dibutuhkan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota memang patut mendapat perhatian. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan, memulai dari rumusan dan

formulasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan *planning* (perencanaan). *Planning* (perencanaan) dapat didefinisikan sebagai “Keseluruhan Proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Kota Malang yang merupakan salah satu daerah Jawa Timur, menjadi bagian dari daerah yang perlu memaksimalkan peningkatan pembangunan. Untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kota Malang, maka dilakukan upaya-upaya yang lebih terarah dan terintegrasi melalui program prioritas, meliputi peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin dan efektifitas program penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses, kualitas dan pemerataan kesehatan, peningkatan kelembagaan masyarakat dan pelayanan umum melalui reformasi borokrasi, peningkatan daya saing daerah, peningkatan ketahanan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas kehidupan beragama serta aktualisasi peran dan fungsi agama dalam aktivitas sehari-hari.

Dari penjelasan diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa Kota Malang menjadi daerah yang sedang merintis pembangunannya untuk menjadi semakin maju. Kelurahan Mulyorejo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Malang yang masih dalam proses pembangunan. Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan

para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP) tahun anggaran yang di rencanakan. Murenbang adalah forum perencanaan (program) yang di laksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses prioritas usulan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Perencanaan pembangunan merupakan kerangka yang dibangun dengan hati-hati yang memiliki cakupan jangka panjang. Rencana ini sering disusun oleh sektor pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan biasanya ditinjau setiap tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dimulai dari tingkat kelurahan yang disebut musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat kelurahan (Musrenbang Kelurahan). Dalam Musrenbang kelurahan diawali melalui penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan

melibatkan segenap elemen masyarakat Kelurahan. Hasil Musrenbang kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari kelurahan serta menyepakati rencana lintas kegiatan lintas kelurahan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Musrenbang kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan, melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota.

Hasil Musrenbang tingkat kecamatan akan menjadi masukan dalam musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi yakni musyawarah perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Dalam mengatur pelaksanaan Musrenbang ini, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan antara lain, yaitu dengan mengeluarkan undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan undang-undang No.25 tahun 2004 Perencanaan Pembangunan bersifat *bottom up* yang menekankan partisipasi dari banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Undang-Undang No.73 Tahun 2005 tentang kelurahan mendefinisikan bahwa kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasuyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati.

Perencanaan Pembangunan merupakan kunci dari pembangunan itu sendiri, Perencanaan menjadi suatu proses yang penting, dalam era Undang- Undang No.73 Tahun 2005 Perencanaan Pembangunan harus melibatkan masyarakat. Proses penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan baiknya sifat jangka menengah (RPJM Kelurahan) ataupun rencana kerja tahunan (RKPkelurahan) harus dilakukan secara partisipasif dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kelurahan Mulyorejo merupakan kelurahan yang terletak diwilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 7 RW (Rukun

Warga) dan 52 RT (Rukun Tetangga) secara administratif, Kelurahan Mulyorejo di kelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di kota Malang. Kelurahan Mulyorejo dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya.

Oleh karena itu dari uraian singkat diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih **judul Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Mulyorejo (Studi Proses Penyusunan Prioritas Usulan Pembangunan Dalam Musrenbangkel Di Kelurahan Mulyorejo)**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses prioritas usulan pembangunan di kelurahan Mulyorejo ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di kelurahan Mulyorejo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menggambarkan atau mendeskripsikan peran pemerintah kelurahan dalam menyusun prioritas usulan pembangunan di kelurahan Mulyorejo.
2. Untuk mengetahui, menggambarkan atau mendeskripsikan

tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di kelurahan Mulyorejo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsi pemikiran khususnya kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi, juga memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi Di Jurusan Administrasi Publik.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Menambah wawasan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kelurahan Mulyorejo dan memperluas pengetahuan di dunia kerja.

###### **b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo**

Memberikan saran dan masukan bagi masyarakat tentang partisipasi dalam proses pembangunan di kelurahan Mulyorejo.